



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Rencana Kerja (RENJA)

**PERUBAHAN TAHUN 2025
KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR**





SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 824 -KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu penetapan Keputusan Bupati untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 –

- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
 23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
 24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
 25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - d. penutup.
- KETIGA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(Perubahan KUA dan PPAS) Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA PERUBAHAN - SKPD) Tahun 2025 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah dapat terselesaikan dengan baik.

RENJA PERUBAHAN - SKPD dibuat dalam rangka penyusunan RKPD untuk Tahun 2025 yang selanjutnya setelah melalui proses sesuai ketentuan, akan dituangkan dalam KUA/PPAS Tahun 2025 yang merupakan dasar dalam penyusunan RKAP-SKPD. Dimana RKAP-SKPD setelah melalui pembahasan oleh TAPD akan diformulasikan ke dalam RAPBDP TA 2025. Oleh karena itu penyusunan RENJA PERUBAHAN-SKPD sangatlah penting dalam suatu proses perencanaan dalam rangka pencapaian visi misi, baik untuk RPJMD maupun visi dan misi RENJA PERUBAHAN-SKPD itu sendiri.

Dalam dokumen perencanaan RENJA PERUBAHAN-SKPD tidak saja memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, namun juga memuat tentang evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yang telah dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan dan dicarikan solusinya, sehingga sasaran dalam RENSTRA-SKPD yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik.

Kami sadari Rencana Kerja Perubahan SKPD Kecamatan Batu Ampar ini belum sempurna, masih banyak yang perlu disempurnakan, koreksi dan perbaikan, agar Rencana Kerja Perubahan SKPD ini lebih baik sangat kami harapkan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk pelayanan kepada masyarakat.

Demikian Rencana Kerja (Renja Perubahan) Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada semua pihak yang membantu dalam proses pembuatan Renja ini kami ucapkan terima kasih.

Batu Ampar, Juni 2025

Camat Batu Ampar,



YUDO RESTANTO, S.STP.M.IP

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 198609012004121002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I	
Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
Bab II	
Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Batu Ampar	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	29
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
Bab III	
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	31
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	31
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	31
Bab IV	
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	33
4.1 Program dan Kegiatan.....	33
Bab V	
Penutup	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses perencanaan pembangunan daerah harus berdasarkan pada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memberikan panduan - panduan terkait tahapan proses perencanaan pembangunan daerah.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
3. Surat Edaran Menteri Dalam Menteri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Sementara itu hubungan dengan pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan

meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Batu Ampar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

- tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 33);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah laut Tahun 2021 Nomor 114);

22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026;
23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026;
24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
25. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 000.7.3/830/P2EPD/2024 tentang Penyusunan Perubahan Renja SKPD Tahun 2025.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rancangan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur proses perencanaan selanjutnya. Rancangan awal tersebut disusun dengan mengacu pada Prioritas Daerah, Sasaran dan Pagu Indikatif.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Renja Perubahan Kecamatan Batu Ampar bertujuan untuk menopang IKU Kecamatan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditargetkan sebesar **87** bernilai **Baik**.
2. Renja Perubahan Kecamatan Batu Ampar juga bertujuan untuk menopang sasaran strategis Indikator Kinerja Inti yaitu : Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Kecamatan Batu Ampar yang akuntabel yang terdiri dari :
 - a. Nilai SAKIP Kabupaten yang ditargetkan sebesar 72 (B)
 - b. Nilai SAKIP Kecamatan Batu Ampar yang ditargetkan sebesar **83** (B)
3. Acuan Kecamatan Batu Ampar dalam proses menyusun program dan kegiatan Perubahan Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Batu Ampar.

4. Untuk mengetahui tingkat pencapaian target dan sasaran setiap program dan kegiatan, baik untuk tahun sebelumnya sampai dengan tahun berjalan. Hal ini ditujukan untuk melihat sampai sejauh mana keberhasilan program dan kegiatan tersebut.
5. Untuk mengetahui besaran pagu indikatif yang diperlukan dalam membiayai setiap program dan kegiatan sebagai bahan untuk menyusun APBD Perubahan Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika yang ditulis adalah menguraikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025, yang terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Batu Ampar
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 4.1. Program dan Kegiatan

Bab V Penutup

BAB II

Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I (satu) Tahun 2025

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari Program kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan Anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan Indikator kinerja yang merupakan alat ukur pencapaian suatu kebijakan/program kegiatan sekaligus merupakan alat ukur yang valid untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah Program dan Kegiatan. Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Batu Ampar

Rencana Kerja merupakan rencana tahunan dari Rencana Strategis, adapun maksud dari penyusunan rencana kerja adalah memberikan gambaran lebih rinci mengenai sasaran dan strategi pencapaian dengan tujuan agar kinerja organisasi dapat terangkat dan lebih terfokus. Dalam pelaporan ini Kecamatan Batu Ampar melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, didukung dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra, setiap program dan kegiatan dibebani suatu indikator kinerja, Program dibebani indikator kinerja yang bersifat hasil (*outcome*) sedangkan kegiatan

dibebani indikator kinerja yang bersifat keluaran (*output*). Target capaian kinerja ditetapkan dalam renstra untuk lima tahun dan dijabarkan dalam target kinerja tahunan dalam renja, hasil pengukuran capaian kinerja tiap tahun atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj).

Output kinerja adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya, sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

Pada tahun 2025 Kecamatan Batu Ampar mengampu **6 (enam) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan** dengan nilai keseluruhan pagu murni sebesar **Rp. 4.373.628.378,-** (empat milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah). Hingga triwulan I (satu) tahun 2025 serapan pagu Kecamatan Batu Ampar sebesar **Rp. 606.677.149,-** (enam ratus enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu serratus empat puluh sembilan rupiah) atau sebesar **14,30%** (empat belas koma tiga puluh persen) dari keseluruhan pagu. Rancangan Pagu Perubahan pada Kecamatan Batu Ampar sebesar **Rp. 4.684.150.975,05,-** (empat milyar enam ratus delapan puluh empat juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma 5 rupiah), bertambah sebesar **Rp. 310.522.597,05** (tiga ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh koma lima rupiah).

Berikut disajikan tabel Capaian Kinerja per 31 Maret 2025 dan tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Batu Ampar Triwulan I (satu) Tahun 2025.

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Batu Ampar

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	5		6		7		8		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Semua Bidang																		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.228.652.597		-		3.094.813.881		553.567.149		553.567.149		17,89%		553.567.149		17,15%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.988.391	0,00	-	100	4.727.069	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%

		(persen)																
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()		3.990.776	0,00	-	6	3.138.045	1	-	1	-	16,67%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3,00	1.997.615	0,00	-	3	1.589.024	3	-	3	-	100,00%	0,00%	3,00	-	100,00%	0,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	100,00	2.538.021.536	0,00	-	100	2.537.510.797	-	462.296.471	-	462.296.471	0,00%	18,22%	0,00	462.296.471	0,00%	18,23%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)		2.535.522.573	0,00	-	4	2.535.522.573	-	462.296.471	-	462.296.471	0,00%	18,23%	0,00	462.296.471	0,00%	18,23%
		*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	15,00		0,00	-	15		13		13		86,67%		13,00		86,67%	

		Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5,00	2.498.963	0,00	-	5	1.988.224	3	-	3	-	60,00%	0,00%	3,00	-	60,00%	0,00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Daerah (persen)		14.152.500	0,00	-	100	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*) (stel)		14.152.500	0,00	-	0	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	20,00		0,00	-	20		-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100,00	329.866.810	0,00	-	100	167.952.655	-	25.021.000	-	25.021.000	0,00%	14,90%	0,00	25.021.000	0,00%	82,32%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan *) (unit)			0,00		0						0,00%		0,00		0,00%	
		*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	94.957.191	0,00	-	1	4.957.191					0,00%		0,00		0,00%	0,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5,00	48.990.420	0,00	-	5	38.894.136	1	2.768.000	1	2.768.000	20,00%	7,12%	1,00	2.768.000	20,00%	5,65%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	1,00	10.991.612	0,00	-	1	10.991.612	1	4.993.000	1	4.993.000	100,00%	45,43%	1,00	4.993.000	100,00%	45,43%

		yang Disediakan (Paket)																
	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakdan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1,00	14.966.881	0,00	-	1	11.949.010	1	3.210.000	1	3.210.000	100,00%	26,86%	1,00	3.210.000	100,00%	21,45%
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan *) (unit)		15.000.000	0,00	-	0		-		-		0,00%		0,00		0,00%	
		*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2,00			0,00	-	2	15.000.000	-		-		0,00%		0,00		0,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	250,00	143.462.300	0,00	-	250	84.662.300	65	14.050.000	65	14.050.000	26,00%	16,60%	65,00	14.050.000	26,00%	9,79%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang dikelola*) (dokumen)		1.498.406	0,00	-	0	1.498.406	-		-		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%

		*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7,00		0,00		7		-		-		0,00%		0,00		0,00%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)		35.520.000	0,00	-	100	35.520.000	-	15.000.000	-	15.000.000	0,00%	42,23%	0,00	15.000.000	0,00%	90,09%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan*) (unit)		18.870.000	0,00	-	0		-		-		0,00%		0,00		0,00%	
		*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1,00			0,00	-	1	18.870.000	-		-		0,00%	0,00%	0,00		0,00%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1,00	16.650.000	0,00	-	1	16.650.000	1	15.000.000	1	15.000.000	100,00%	90,09%	1,00	15.000.000	100,00%	90,09%

		Disediakan (Unit)																
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	210.459.160	0,00	-	100	210.459.160	-	43.331.578	-	43.331.578	0,00%	20,59%	0,00	43.331.578	0,00%	38,66%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00	55.000.000	0,00	-	12	55.000.000	3	9.179.434	3	9.179.434	25,00%	16,69%	3,00	9.179.434	25,00%	16,69%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	155.459.160	0,00	-	12	155.459.160	3	34.152.144	3	34.152.144	25,00%	21,97%	3,00	34.152.144	25,00%	21,97%

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)		94.644.200	0,00	-	100	138.644.200	-	7.918.100	-	7.918.100	0,00%	5,71%	0,00	7.918.100	0,00%	12,26%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		35.000.000	0,00	-	1	35.000.000	1	4.290.000	1	4.290.000	100,00%	12,26%	1,00	4.290.000	0,00%	12,26%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		-	0,00	-	11	44.000.000	5	3.628.100	5	3.628.100	45,45%	8,25%	5,00	3.628.100	0,00%	0,00%

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara *) (unit)			0,00	0		-			0,00%		0,00		0,00%	
		*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	36,00	19.684.200	0,00	36	19.684.200	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara*/terpelihara*) (unit)			0,00	0		-			0,00%		0,00		0,00%	
		*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1,00	39.960.000	0,00	1	39.960.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											41,33%	17,89%				

													Predikat Kinerja					
													Sangat Rendah	Sangat Rendah				
KECAMATAN																		
PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							4.784.100						0,00%				0,00%	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Persen)				0,00	100							0,00%	0,00			0,00%	
							4.784.100						0,00%				0,00%	
	Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di	100,00			0,00	100							0,00%	0,00			0,00%	

		Kecamatan (Persen)																
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5,00	-	0,00	-	5	4.784.100	1	-	1	-	20,00%	0,00%	1,00	-	20,00%	0,00%
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			20,00%	0,00%					
									Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			39.746.813		-		27.098.446		5.580.000		5.580.000		20,59%		5.580.000		14,04%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Persen)	100,00	39.746.813	0,00	-	100	27.098.446	-	5.580.000	-	5.580.000	0,00%	20,59%	0,00	5.580.000	0,00%	14,04%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan		39.746.813	0,00	-	1	27.098.446	-	5.580.000	-	5.580.000	0,00%	20,59%	0,00	5.580.000	0,00%	14,04%

	Kecamatan	Pemberda yaan Masyarak at di Wilayah Kecamata n (Laporan)																
		*Jumlah Laporan Peningkat an Efektivitas Kegiatan Pemberda yaan Masyarak at di Wilayah Kecamata n (Laporan)	1,00		0,00		1		0		0		25,00%		0,25		25,00%	
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	12,50%	20,59%			
													Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			15.870.000		-		10.350.000		-		-	0,00%		-		0,00%	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum	Persentas e capaian Koordinasi Upaya Penyeleng garaan Ketentera man dan Ketertiban Umum (Persen)		15.870.000	0,00	-	100	10.350.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)			0,00	4		-			0,00%		0,00		0,00%	
			15.870.000				10.350.000		-			0,00%		-		0,00%
		*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4,00		0,00	4		-			0,00%		0,00		0,00%	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%				
										Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				

	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		1.087.827.804	-		1.073.518.708		32.085.000		32.085.000		2,99%		32.085.000		2,95%		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentas e capaian Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum sesuai Penugasa n Kepala Daerah	100,00	1.087.827.804	0,00	-	100	1.073.518.708	-	32.085.000	-	32.085.000	0,00%	2,99%	0,00	32.085.000	0,00%	3,29%

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (orang)	19,00	99.999.960	0,00	-	19	93.873.810	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
---	---	-------	------------	------	---	----	------------	---	---	---	---	-------	-------	------	---	-------	-------

	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (orang)	500,00	974.327.844	0,00	-	500	966.144.898	400	32.085.000	400	32.085.000	80,00%	3,32%	400,00	32.085.000	80,00%	3,29%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	8,00	13.500.000	0,00	-	8	13.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			72,00%	2,99%					
									Predikat Kinerja			Sedang	Sangat Rendah					
	PROGRAM PEMBINAAN DAN			41.531.246		-		32.930.016		15.445.000		15.445.000		46,90%		15.445.000		37,19%

PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen)		41.531.246	0,00	100		32.930.016	-	15.445.000	-	15.445.000	0,00%	46,90%	0,00	15.445.000	0,00%	120,99%
		Persentase capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen)	100,00		0,00	100		32.930.016	-	15.445.000	-	15.445.000	0,00%	46,90%	0,00	15.445.000	0,00%	120,99%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	14,00	9.977.317	0,00	-	14	7.110.000	12	3.690.000	12	3.690.000	85,71%	51,90%	12,00	3.690.000	85,71%	36,98%

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	28,00	10.997.550	0,00	-	28	8.792.550	7	-	7	-	25,00%	0,00%	7,00	-	25,00%	0,00%
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	1,00	6.563.629	0,00	-	1	5.264.916	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)		13.992.750	0,00	-	2	11.762.550	-	11.755.000	-	11.755.000	0,00%	99,94%	0,00	11.755.000	0,00%	84,01%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Batu Ampar

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Batu Ampar yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Tanah Laut serta rencana strategis Kecamatan Batu Ampar, maka di lakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan lingkup SKPD yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan bagi kepentingan perencanaan pembangunan di Kecamatan Batu Ampar.

Kecamatan Batu Ampar dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan Standar Pelayanan yang merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi layanan dan atau penerima layanan.

Kinerja Pelayanan Kecamatan Batu Ampar salah satu tolok ukurnya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 berupa survei dengan hasil 87,89 atau tercapai sebesar 102 % dari target Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebesar 86. Pencapaian kinerja pelayanan yang ada di Kecamatan Batu Ampar yang telah ditetapkan sesuai dengan RPD Tahun 2024 - 2026 terdapat pada tabel TC-25 (terlampir), begitu juga capaian atas kinerja program / kegiatan Tahun 2025 Triwulan I (satu) terdapat pada Tabel TC-30 (terlampir).

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Batu Ampar.

Ada beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Batu Ampar sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan Batu Ampar.
2. Kekurangan aparatur, dan ditambah lagi ada yang memasuki masa pensiun.
3. Peningkatan Kerjasama dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait.
4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat sekitar.
5. Memberikan fasilitasi kemudahan bagi kepentingan UKM.

6. Membina masyarakat khususnya pemuda untuk maju dan berdikari serta berperan aktif dalam pembangunan.
7. Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba bagi pemuda dan pemudi usia sekolah.

Ada beberapa hal yang menjadi peluang dan tantangan yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kinerja SKPD Kecamatan Batu Ampar ke depan adalah :

- a. Sumber Daya Manusia Aparatur
 1. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
 2. Jumlah SDM yang belum sesuai dengan kebutuhan aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.
- b. Sarana dan Prasarana :
 1. Mengembangkan Teknologi Informasi serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam upaya meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
 2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
 3. Daftar kekurangan kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan dan optimalisasi pemeliharaan sarana dan prasarana

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan dilakukan terhadap program dan kegiatan yang dilakukan untuk Renstra SKPD Kecamatan Batu Ampar Tahun 2024 – 2026, yang berisi perencanaan program / kegiatan selama 3 (tiga) tahun, direncanakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam penelaahan usulan program dan kegiatan perlu proses, dan dilakukan dengan meminta masukan dari Camat, Sekretaris Camat, kasubbag, Kasi dan staf dengan mengedepankan keperluan dan skala prioritas, baik keperluan administrasi kantor, maupun kebutuhan aparat kecamatan yang mendesak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Renja, tidak terlepas dari Kebijakan Nasional. Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional dan daerah sangat tergantung dari sinergitas dan sinkronisasi kebijakan yang diambil antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing – masing yang berorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang **pro growth, pro job, pro poor dan pro environment** serta pengembangan program percepatan pengurangan kemiskinan.

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (UU No. 17 Tahun 2007) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer yang penting serta khusus untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Disamping itu hasil-hasil pembangunan harus dapat meningkatkan daya saing daerah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Kecamatan Batu Ampar

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 adalah :

1. Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan secara optimal dalam rangka melaksanakan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Kecamatan Batu Ampar untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan yang diharapkan.
2. Efektivitas dan produktivitas kerja, keterampilan serta pengetahuan yang menunjang kerja aparat kecamatan.
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat didesa.

4. Peningkatan kinerja, kualitas dan pengetahuan aparatur desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Terciptanya rasa solidaritas dan ikatan sosial antara pemerintah dengan masyarakat.
6. Peningkatan dan pengembangan nilai- nilai agama dalam bentuk bernegara berpemerintahan, dan bermasyarakat.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 ini adalah :

1. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Tertib tata kelola administrasi pemerintahan kecamatan; berupa Pelayanan administrasi perkantoran, dan Pelayanan administrasi keuangan.
3. Pelayanan publik bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pelayanan publik bidang kemasyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pelayanan publik bidang pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Pelayanan publik bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Pelayanan publik pelayanan terpadu kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Tahun 2025 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan Renstra Transisi 2024 – 2026. Mengacu pada Pasal 147 ayat (2) Permendagri tersebut bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten / kota, sehingga penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten / kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten / kota dengan pembangunan daerah provinsi.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 yang dilaksanakan Kecamatan Batu Ampar ada **6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub kegiatan** dengan total dana / pagu indikatif yang diusulkan **sebelum perubahan sebesar Rp. 4.373.628.378,-** dan **setelah Perubahan menjadi Rp. 4.684.150.975,05,-**. Program Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

REKAPITULASI PAGU PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 KECAMATAN BATU AMPAR

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	TARGET MURNI 2025	TARGET PERUBAHAN 2025	PAGU 2025 (Rp)	PAGU PERGESERAN TERAKHIR 2025	RENCANA PERGESERAN / PENAMBAHAN (Rp)	SELISIH Rp (+/-)	PENAMBAHAN PAGU	TOTAL PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11 = 10 - 8)	(9)	(10)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Sekretariat Kecamatan Batu Ampar			Rp 3.182.652.597,00	Rp 3.244.689.378,00	Rp 3.420.120.212,46	Rp 175.430.834,46	Rp 175.430.834,46	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp 5.988.391,00	Rp 4.727.069,40	Rp 5.272.816,48	Rp 545.747,08	Rp 545.747,08	

7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	7 Dokumen	Rp 3.990.776,00	Rp 3.138.045,40	Rp 3.683.792,48	Rp 545.747,08	Rp 545.747,08	Rp 3.683.792,48
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		Rp 1.997.615,00	Rp 1.589.024,00	Rp 1.589.024,00	Rp -	Rp -	Rp 1.589.024,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp 2.538.021.536,00	Rp 2.687.386.292,50	Rp 2.687.386.292,50	Rp -	Rp -	Rp 2.687.386.292,50
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang 14 Bulan	17 Orang 14 Bulan	Rp 2.535.522.573	Rp 2.685.398.068,00	Rp 2.685.398.068,00	Rp -	Rp -	Rp 2.685.398.068,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen		Rp 2.498.963	Rp 1.988.224,50	Rp 1.988.224,50	Rp -	Rp -	Rp 1.988.224,50
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Daerah			Rp 14.152.500,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

7.01.01.2.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20 Paket		Rp 14.152.500,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp 239.866.810,00	Rp 167.952.656,10	Rp 295.937.993,48	Rp 127.985.337,38	Rp 127.985.337,38	Rp 295.937.993,48
7.01.01.2.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		Rp 4.957.191,00	Rp 4.957.191,00	Rp 4.957.191,00	Rp -	Rp -	Rp 4.957.191,00
7.01.01.2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10 Paket	Rp 48.990.420,00	Rp 38.894.136,33	Rp 88.892.905,49	Rp 49.998.769,16	Rp 49.998.769,16	Rp 88.892.905,49
7.01.01.2.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		Rp 10.991.612,00	Rp 10.991.612,00	Rp 10.991.612,00	Rp -	Rp -	Rp 10.991.612,00

7.01.01.2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		Rp 14.966.881,00	Rp 11.949.010,77	Rp 11.949.010,77	Rp -	Rp -	Rp 11.949.010,77
7.01.01.2.06.000 7	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan Material yang Disediakan	2 Paket		Rp 15.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Rp 17.986.568,22	Rp 2.986.568,22	Rp 2.986.568,22	Rp 17.986.568,22
7.01.01.2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan		Rp 143.462.300,0 0	Rp 84.662.300,00	Rp 159.662.300,00	Rp 75.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Rp 159.662.300,00
7.01.01.2.06.001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 Dokumen		Rp 1.498.406,00	Rp 1.498.406,00	Rp 1.498.406,00	Rp -	Rp -	Rp 1.498.406,00

7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp 35.520.000,00	Rp 35.520.000,00	Rp 52.419.750,00	Rp 16.899.750,00	Rp 16.899.750,00	Rp 52.419.750,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang di sediakan	1 unit	10 unit	Rp 18.870.000,00	Rp 18.870.000,00	Rp 35.769.750,00	Rp 16.899.750,00	Rp 16.899.750,00	Rp 35.769.750,00
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit		Rp 16.650.000,00	Rp 16.650.000,00	Rp 16.650.000,00	Rp -	Rp -	Rp 16.650.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp 210.459.160,00	Rp 210.459.160,00	Rp 240.459.160,00	Rp 30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 240.459.160,00

7.01.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Rp 55.000.000,00	Rp 55.000.000,00	Rp 85.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 85.000.000,00
7.01.01.2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Rp 155.459.160,00	Rp 155.459.160,00	Rp 155.459.160,00	Rp -	Rp -	Rp 155.459.160,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp 138.644.200,00	Rp 138.644.200,00	Rp 138.644.200,00	Rp -	Rp -	Rp 138.644.200,00
7.01.01.2.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit		Rp 35.000.000,00	Rp 35.000.000,00	Rp 35.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 35.000.000,00

7.01.01.2.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit		Rp 44.000.000,00	Rp 44.000.000,00	Rp 44.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 44.000.000,00
7.01.01.2.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	36 unit		Rp 19.684.200,00	Rp 19.684.200,00	Rp 19.684.200,00	Rp -	Rp -	Rp 19.684.200,00
7.01.01.2.09.001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 unit		Rp 39.960.000,00	Rp 39.960.000,00	Rp 39.960.000,00	Rp -	Rp -	Rp 39.960.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kec. Batu Ampar			Rp 5.999.918,00	Rp 4.784.100,00	Rp 4.784.100,00	Rp -	Rp -	Rp 4.784.100,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat			Rp 5.999.918,00	Rp 4.784.100,00	Rp 4.784.100,00	Rp -	Rp -	Rp 4.784.100,00

	Kecamatan	Daerah yang Ada di Kecamatan								
7.01.02.2.02.000 2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan		Rp 5.999.918,00	Rp 4.784.100,00	Rp 4.784.100,00	Rp -	Rp -	Rp 4.784.100,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	IKM Kec. Batu Ampar			Rp 39.746.813,00	Rp 27.098.446,00	Rp 36.038.446,00	Rp 8.940.000,00	Rp 8.940.000,00	Rp 36.038.446,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Rp 39.746.813,00	Rp 27.098.446,00	Rp 36.038.446,00	Rp 8.940.000,00	Rp 8.940.000,00	Rp 36.038.446,00
7.01.03.2.01.000 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		Rp 39.746.813,00	Rp 27.098.446,00	Rp 36.038.446,00	Rp 8.940.000,00	Rp 8.940.000,00	Rp 36.038.446,00

7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	IKM Kec. Batu Ampar			Rp 15.870.000,00	Rp 10.350.000,00	Rp 14.550.000,00	Rp 4.200.000,00	Rp 4.200.000,00	Rp 14.550.000,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Rp 15.870.000,00	Rp 10.350.000,00	Rp 14.550.000,00	Rp 4.200.000,00	Rp 4.200.000,00	Rp 14.550.000,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		Rp 15.870.000,00	Rp 10.350.000,00	Rp 14.550.000,00	Rp 4.200.000,00	Rp 4.200.000,00	Rp 14.550.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	IKM Kec. Batu Ampar			Rp 1.087.827.804,00	Rp 1.073.518.708,00	Rp 1.177.103.116,59	Rp 103.584.408,59	Rp 103.584.408,59	Rp 1.177.103.116,59

7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			Rp 1.087.827.804,00	Rp 1.073.518.708,00	Rp 1.177.103.116,59	Rp 103.584.408,59	Rp 103.584.408,59	Rp 1.177.103.116,59
7.01.05.2.02.01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Peminaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia	19 orang		Rp 99.999.960,00	Rp 93.873.810,00	Rp 101.846.310,00	7.972.500,00	Rp 7.972.500,00	Rp 101.846.310,00

7.01.05.2.02.0004	Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	500 orang	1500 orang	Rp 974.327.844,00	Rp 966.144.898,00	Rp 1.048.256.806,59	82.111.908,59	Rp 82.111.908,59	Rp 1.048.256.806,59
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 Dokumen	6 Dokumen	Rp 13.500.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 27.000.000,00	13.500.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 27.000.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	IKM Kec. Batu Ampar			Rp 41.531.246,00	Rp 32.930.016,00	Rp 31.555.100,00	-Rp 1.374.916,00	-Rp 1.374.916,00	Rp 31.555.100,00

7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			Rp 41.531.246,00	Rp 32.930.016,00	Rp 31.555.100,00	-Rp 1.374.916,00	-Rp 1.374.916,00	Rp 31.555.100,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 Dokumen		Rp 9.977.317,00	Rp 7.110.000,00	Rp 11.000.000,00	Rp 3.890.000,00	Rp 3.890.000,00	Rp 11.000.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	28 Dokumen		Rp 10.997.550,00	Rp 8.792.550,00	Rp 8.792.550,00	Rp -	Rp -	Rp 8.792.550,00
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0 Dokumen	Rp 6.563.629,00	Rp 5.264.916,00	Rp -	-Rp 5.264.916,00	-Rp 5.264.916,00	Rp -
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Singkronisasi perencanaan pembangunan	Jumlah Dokumen singkronisasi perencanaan	2 Dokumen		Rp 13.992.750,00	Rp 11.762.550,00	Rp 11.762.550,00	Rp -	Rp -	Rp 11.762.550,00

	Daerah dengan pembangunan desa	pembangunan Daerah dengan pembangunan desa							
Total Jumlah			Rp 4.373.628.378, 00	Rp 4.393.370.648,0 0	Rp 4.684.150.975,0 5	Rp 290.780.327,05	Rp 290.780.327,0 5	Rp 4.684.150.975,05	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Batu Ampar selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara optimal. Untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat di lingkup Kecamatan Batu Ampar.

Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Batu Ampar dalam satu tahun bagi seluruh Aparatur Kecamatan Batu Ampar. Renja memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Batu Ampar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Batu Ampar, Juni 2025

Camat Batu Ampar,



YUDO RESTANTO, SSTP, M.IP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19860901 200412 1 002

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. TANAH LAUT
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							4.452.144.751,00	4.373.628.378,00	4.684.150.975,05	232.006.224,05							4.937.604.470,00	
	7.01	KECAMATAN							4.452.144.751,00	4.373.628.378,00	4.684.150.975,05	232.006.224,05							4.937.604.470,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Sekretariat Kecamatan Batu Ampar				90,5 Nilai	90,5 Nilai	3.218.380.297,00	3.182.652.597,00	3.420.120.212,46	904.711.781,00							4.123.092.078,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	5.988.391,00	5.988.391,00	5.272.816,48	-715.574,52			-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	ASN Kantor Kec. Batu Ampar		13.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	7 Dokumen	3.990.776,00	3.990.776,00	3.683.792,48	-306.983,52	Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			7.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.997.615,00	1.997.615,00	1.589.024,00	-408.591,00	Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			6.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	2.538.021.536,00	2.538.021.536,00	2.687.386.292,50	149.364.756,50			-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	ASN Kantor Kec. Batu Ampar		3.123.541.221,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.535.522.573,00	2.535.522.573,00	2.685.398.068,00	149.875.495,00	Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			3.115.541.221,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	2.498.963,00	2.498.963,00	1.988.224,50	-510.738,50	Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			8.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Daerah				100 persen	100 persen	14.152.500,00	14.152.500,00	0,00	-14.152.500,00			-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	ASN Kantor Kec. Batu Ampar		19.500.000,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	20 Paket	14.152.500,00	14.152.500,00	0,00	-14.152.500,00	Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			19.500.000,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	275.554.510,00	239.866.810,00	295.937.993,48	20.383.483,48			-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	ASN Kantor Kec. Batu Ampar		372.050.857,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.957.191,00	4.957.191,00	4.957.191,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			2.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	9 Paket	48.990.420,00	48.990.420,00	88.892.905,49	39.902.485,49	Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			97.154.042,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.991.612,00	10.991.612,00	10.991.612,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			18.684.815,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.966.881,00	14.966.881,00	11.949.010,77	-3.017.870,23	Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			19.562.000,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	17.986.568,22	2.986.568,22	Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			19.650.000,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250 Laporan	250 Laporan	179.150.000,00	143.462.300,00	159.662.300,00	-19.487.700,00	Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			200.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	1.498.406,00	1.498.406,00	1.498.406,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 persen	100 persen	35.520.000,00	35.520.000,00	52.419.750,00	16.899.750,00			-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat / ASN Kec. Batu Ampar		330.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	4 Unit	18.870.000,00	18.870.000,00	35.769.750,00	16.899.750,00	Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			250.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	16.650.000,00	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			50.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 persen	100 persen	210.459.160,00	210.459.160,00	240.459.160,00	30.000.000,00			-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	ASN Kantor Kec. Batu Ampar		60.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	55.000.000,00	55.000.000,00	85.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			60.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	155.459.160,00	155.459.160,00	155.459.160,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 persen	100 persen	138.684.200,00	138.644.200,00	138.644.200,00	-40.000,00			-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	ASN Kantor Kec. Batu Ampar		205.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			35.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			55.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				36 Unit	36 Unit	19.684.200,00	19.684.200,00	19.684.200,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	39.960.000,00	39.960.000,00	-40.000,00	Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			85.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kec. Batu Ampar				87 Nilai	87 Nilai	5.999.918,00	5.999.918,00	4.784.100,00	9.000.082,00							15.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				100 Persen	100 Persen	5.999.918,00	5.999.918,00	4.784.100,00	-1.215.818,00			-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat di Kec. Batu Ampar		15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	5.999.918,00	5.999.918,00	4.784.100,00	-1.215.818,00	Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	IKM Kec Batu Ampar				87 Nilai	87 Nilai	46.303.813,00	39.746.813,00	36.038.446,00	-6.303.813,00							40.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				100 Persen	100 Persen	46.303.813,00	39.746.813,00	36.038.446,00	-10.265.367,00			-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Anggota PKK di Kec. Batu Ampar		40.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	46.303.813,00	39.746.813,00	36.038.446,00	-10.265.367,00	Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			40.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	IKM Kec Batu Ampar				87 Nilai	87 Nilai	15.965.000,00	15.870.000,00	14.550.000,00	49.035.000,00							65.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100 persen	100 persen	15.965.000,00	15.870.000,00	14.550.000,00	-1.415.000,00			-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat di Kec. Batu Ampar		65.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	15.965.000,00	15.870.000,00	14.550.000,00	-1.415.000,00	Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			50.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	IKM Kec Batu Ampar				86 Nilai	86 Nilai	1.119.941.804,00	1.087.827.804,00	1.177.103.116,59	-485.429.412,00							634.512.392,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				100 % 100 persen	100 % 100 persen	1.119.941.804,00	1.087.827.804,00	1.177.103.116,59	57.161.312,59			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat / Ormas di Kec. Batu Ampar		634.512.392,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				19 Orang	19 Orang	99.999.960,00	99.999.960,00	101.846.310,00	1.846.350,00	Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik		169.512.392,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				500 Orang	1500 Orang	974.977.844,00	974.327.844,00	1.048.256.806,59	73.278.962,59	Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik		400.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				8 Dokumen	6 Dokumen	44.964.000,00	13.500.000,00	27.000.000,00	-17.964.000,00	Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik		65.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR	
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	IKM Kec Batu Ampar				87 Nilai	87 Nilai	45.553.919,00	41.531.246,00	31.555.100,00	14.446.081,00							60.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 persen	100 persen	45.553.919,00	41.531.246,00	31.555.100,00	-13.998.819,00			-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat / Desa di Kec. Batu Ampar		60.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				14 Dokumen	14 Dokumen	9.999.990,00	9.977.317,00	11.000.000,00	1.000.010,00	Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik		15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				28 Dokumen	28 Dokumen	14.997.550,00	10.997.550,00	8.792.550,00	-6.205.000,00	Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik		25.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	0 Dokumen	6.563.629,00	6.563.629,00	0,00	-6.563.629,00	Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik		0,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR	
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	13.992.750,00	13.992.750,00	11.762.550,00	-2.230.200,00	Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik		20.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR	
J U M L A H									4.452.144.751,00	4.373.628.378,00	4.684.150.975,05	565.381.894.265,27							4.937.604.470,00	